

## **Kinerja Satgas Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Terhadap Angka Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar.(Studi Kasus di Desa Pemogan)**

### ***The Impact of the Covid-19 Task Force on the Implementation of Micro-Scale Community Activity Restrictions (PPKM) on the Number of Covid-19 Cases in Denpasar City. (Case Study in Pemogan Village)***

Ni Wayan Rahadi, \*Ni Putu Pandawani, I Ketut Widnyana

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Universitas Mahasaraswati Denpasar

\*Email: [pandawaniputu@unmas.ac.id](mailto:pandawaniputu@unmas.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk penanganan kasus Covid-19 salah satunya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Pengambilan data dilakukan dengan *exit interview* melalui wawancara mendalam dan analisa data disajikan dalam bentuk narasi berdasarkan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman regulasi yang benar dari Satgas Covid-19, kredibilitas dari Satgas Covid-19 dan pemberian edukasi yang berkesinambungan dapat memberikan dampak positif di masyarakat sehingga mempengaruhi kinerja Satgas Covid-19. Motivasi untuk pemulihan ekonomi menjadi faktor yang dapat memberikan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi PPKM Mikro sehingga memudahkan kinerja Satgas Covid-19 dalam melakukan pemantauan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian kinerja Satgas Covid-19 belum efektif hal ini dikarenakan masih adanya kendala - kendala yang dihadapi oleh Satgas Covid-19 masih ada masyarakat yang tidak patuh dalam pelaksanaan PPKM Mikro.

**Kata Kunci:** Kinerja, Satgas Covid-19, Penurunan Kasus

#### **ABSTRACT**

The government has set regulations for handling Covid-19 cases, one of which is the Implementation of Micro Community Activity Restrictions (PPKM). This study uses a qualitative descriptive method through a phenomenological approach with a sample of 40 people. Data collection was done by exit interview through in-depth interviews and data analysis was presented in the form of a thematic based narrative. The results of the study show that the correct understanding of regulations from the Covid-19 Task Force, the credibility of the Covid-19 Task Force and the provision of continuous education can have a positive impact on the community so that it affects the performance of the Covid-19 Task Force. The motivation for economic recovery is a factor that can provide awareness from the public to comply with the Micro PPKM so as to facilitate the performance of the Covid-19 Task Force

in conducting monitoring in the community. Based on the results of the research, the performance of the Covid-19 Task Force has not been effective, this is because there are still obstacles faced by the Covid-19 Task Force, there are still people who do not comply with the implementation of Micro PPKM.

**Keywords:** Performance, Covid-19 Task Force, Decrease in Cases

## PENDAHULUAN

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi di tahun 2020 yang telah memberikan tekanan dan dampak besar pada dunia termasuk Indonesia. Data dari WHO menyatakan bahwa penyebaran virus Covid-19 di dunia pertanggal 22 Januari 2022 sebanyak 349.134.552 jiwa (WHO, 2022). Penyebaran Covid 19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah kasus dan kematian yang cukup tinggi, berdampak pada beberapa aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sejak 14 Maret 2020 dan sampai dengan 22 Januari 2022 total kasus terkonfirmasi Covid 19 di Indonesia mencapai angka 4.283.453 orang dengan jumlah total kematian sebanyak 144.206 jiwa. Penanganan pandemi yang dilakukan lebih awal sangat menentukan keberhasilan dari penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keputusan Presiden tersebut menyatakan Covid -19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes, 2020).

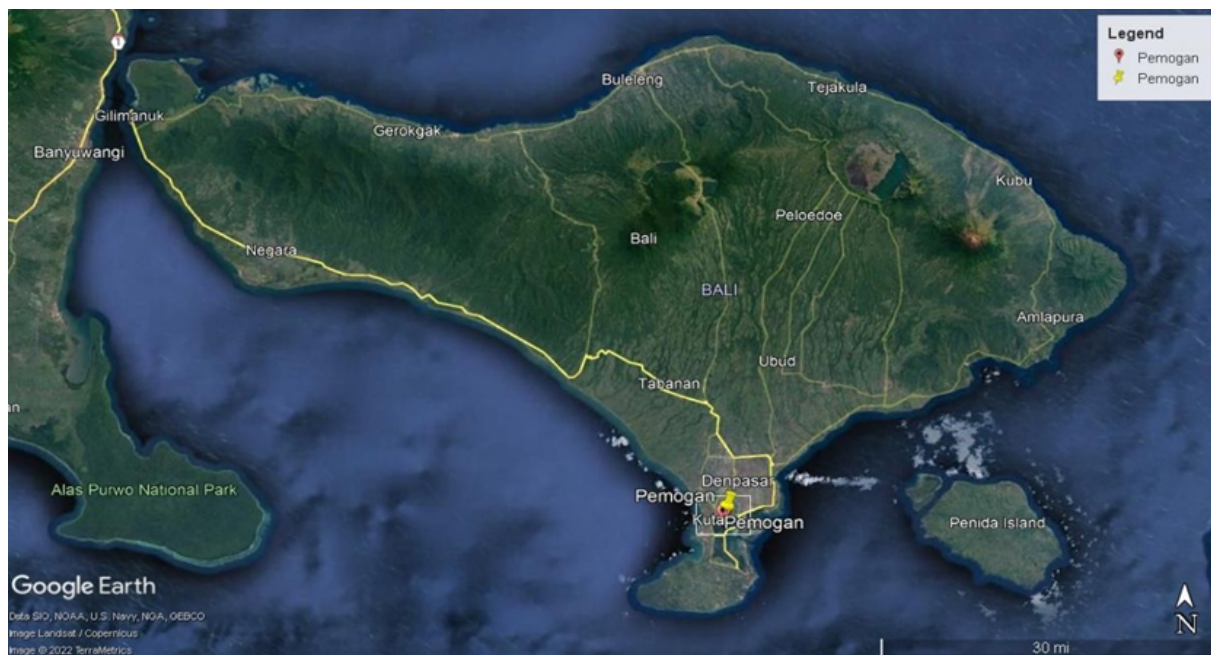
Atas pertimbangan penyebaran Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Kemenkes, 2010).

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Adanya penetapan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro baik tingkat desa/ kelurahan (Kemendagri RI., 2021) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mendorong adanya respons yang tangguh dalam hal kendali Covid-19 ini pada level mikro, namun perlu dilihat efektivitas dan konsistensinya sehingga perlu dikuatkan dan ditetapkan sebagai model yang dapat direplikasi pada seluruh desa di

Indonesia secara proporsional sesuai situasi dan tantangan epideminya. Upaya pengendalian Covid-19 yang efektif diperlukan preventif dan promotif dari tingkat terkecil (mikro) yaitu dari komunitas tingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi sangat relevan adanya Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 pada desa/kelurahan bersama stakeholder terkait di tingkat desa/kelurahan masing-masing dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, yang diharapkan dapat efektif mencegah dan mengendalikan Covid -19. Atas dasar ini diperlukan kolaborasi bersama Satuan tugas penanganan Covid - 19 dengan beberapa instituti dan lembaga dalam memperkuat dan memastikan adanya model desa/kelurahan yang efektif dalam penanganan Covid-19 (Kemendagri RI., 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor- aktor mempengaruhi kinerja Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM terhadap angka kejadian Covid-19 di Kota Denpasar.

## METODOLOGI

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dapat menggambarkan suatu permasalahan secara alamiah dan menginterpretasi perilaku seseorang sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi (Ahmadi, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan yang termasuk dalam zona oranye. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Maret sampai dengan Mei 2022.



Gambar 1. Peta Propinsi Bali Sumber Data: Google Earth 2022



Gambar 2. Peta Kota Denpasar Sumber data: Peta 2022

Penelitian menggunakan jenis data primer bersifat kualitatif, merupakan data yang didapatkan dari bentuk kalimat pernyataan, uraian, dan deskripsi yang mengandung suatu makna serta nilai tertentu. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang telah dipilih sebagai partisipan (Herdiansyah, 2013). Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku profil, laporan, hasil-hasil penelitian dan dokumen lainnya seperti data geografi, demografi dan capaian program periode sebelumnya. Penelitian ini menggunakan instrumen yang berbentuk kuisioner dan wawancara mendalam. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, peran peneliti sebagai instrumen penelitian sangat penting artinya dalam konteks pengamatan (Moleong, 2013).

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, digunakan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan pendapat responden. Peneliti menggunakan panduan wawancara atau scrip wawancara untuk mengarahkan partisipan menceritakan persepsinya. Dalam penataan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini menganut prinsip "cerobong", yaitu dimulai dari segi-segi umum dan diarahkan ke segi-segi khusus (Moleong, 2013) Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tehnik ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satgas Covid-19 dalam penurunan kasus Covid-19. Wawancara mendalam dilakukan dengan waktu maksimal 30 menit untuk masing-masing partisipan yang diwawancarai, agar nantinya data yang diperoleh dari responden lebih akurat dan efektif.

Analisis data menggunakan analisis tematik yang dilakukan dengan mencari tema penting yang muncul sehingga dapat mendeskripsikan fenomena pada suatu permasalahan penelitian (Fereday, 2006). Langkah-langkahnya dimulai dari menggabungkan data dasar dengan mendengar rekaman yang telah di back up dalam flashdisk, membaca transkrip, dan memberikan kode-kode berdasarkan data dasar yang diperoleh. Kode-kode tersebut kemudian

di recoding kembali untuk menemukan beberapa kode yang sama sehingga dapat disatukan menjadi sebuah sub tema. Hasil subtema tersebut, dihubungkan pada beberapa tema penting yang lebih umum (Sastroasmoro, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden, sebagian besar responden mengetahui tentang regulasi dari Pemerintah dalam upaya penerapan PPKM Mikro di desa Pemogan. Pemahaman yang benar tentang regulasi dari Pemerintah terkait penerapan PPKM Mikro merupakan salah satu upaya dalam memudahkan satgas Covid-19 untuk melakukan pemantauan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kecemasan masyarakat akan adanya penyebaran Covid-19 maka pemerintah membuat kebijakan untuk pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti halnya *Social Distancing*, *Physical Distancing*, PSBB, PPKM berbasis Mikro dan sebagainya, yang dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia baik secara sistem masyarakat dan kelembagaan negara.

Pemaparan kutipan jawaban diatas menunjukkan bahwa regulasi dari pemerintah dapat memberikan pengaruh positif dan negatif dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Pemogan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Mohammed Abdela Mahammed yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah untuk melakukan lockdown akan memberikan pengaruh positif yang akan menekan lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain juga memberikan pengaruh negatif seperti kemunduran ekonomi, kegagalan usaha sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan (Mohammed, 2020). Regulasi yang dibuat pemerintah untuk pelaksanaan PPKM Mikro di desa Pemogan menunjukkan berbagai respon masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja dari Satgas Covid-19. Respon masyarakat terhadap regulasi Pemerintah disebabkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap regulasi tersebut.

Trust in Government menyatakan terdapat 6 area agar dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap suatu regulasi (OECD, 2016). Salah satu area tersebut adalah *Inclusive Policy Making* yang menjadi prioritas bagi Pemerintah adalah membangun proses pembuatan kebijakan yang kondusif untuk dapat dipercaya. Pemerintah juga harus meningkatkan komitmen untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin proses pembuatan kebijakan yang adil akan meningkatkan keputusan kebijakan serta dibangun berdasarkan keputusan yang tepat dengan menggunakan informasi yang relevan. Sebagian besar responden menyatakan regulasi dari pemerintah ini, dapat memberikan pengaruh positif dalam penerapan PPKM Mikro di Desa Pemogan. Apabila masyarakat percaya bahwa regulasi yang dibuat dapat memberikan dampak positif, maka masyarakat akan menaati aturan yang telah ditetapkan sehingga memudahkan Satgas Covid-19 untuk melakukan pemantauan terhadap mobilitas masyarakat. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di desa Pemogan.

Hasil wawancara mendalam dengan responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM Mikro didapatkan hasil 40 responden mengatakan mengetahui dan mengikuti regulasi pusat dalam penerapan PPKM Mikro di Desa Pemogan. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kecemasan masyarakat dengan adanya penyebaran Covid-19 seperti PSBB, PPKM berbasis Mikro. Regulasi juga memberikan dampak atau pengaruh positif dan negatif (Hidayat, 2020). 36 Responden mengatakan pengaruh regulasi terhadap pelaksanaan PPKM Mikro memberikan pengaruh positif dan 4 Responden mengatakan pengaruh regulasi terhadap pelaksanaan PPKM Mikro memberikan pengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan Mohammed

Abdela Mahammed yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah untuk *lockdown* akan memberikan pengaruh positif dapat menekan lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain juga memberikan pengaruh negatif seperti kemunduran ekonomi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan, didapatkan beberapa peran yang sudah dilakukan oleh Satgas Covid-19 dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dipaparkan dalam pernyataan responden sebagai berikut : “Kami langsung menjemput, langsung kerumah masing masing, memberikan arahan kepada masyarakat , tolong dengan melonjaknya kasus di pemogan, dengan indikasi seperti itu, kami pihak banjar dan satgas turun ke lapangan door to door, memberi arahan jaga kondisi jaga kesehatan dan pagi pagi olahraga”

(Responden 2, 40 Tahun) “Peranannya sangat penting itu, karena terjun langsung dan bersentuhan dengan masyarakat langsung door to door. sosialisasi ke warung warung dan toko toko , mengawasi antrian dan masker wajib” (Responden 9, 40 Tahun). Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 untuk menurunkan angka kasus Covid-19 di desa Pemogan. Pembentukan Satgas Covid-19 ini memberikan dampak positif, negatif bahkan dianggap tidak berdampak apapun bagi desa Pemogan. Dampak positifnya dipaparkan sebagai berikut : “Masyarakat sudah mau mengikuti himbauan pemerintah salah satunya memakai masker keluar dari rumah” (Responden 35, 48 Tahun). “Kerumunan masyarakat berkurang, mungkin ada yang tidak tahu, jadi mereka tetap kesana, tapi kita tetap memberi himbauan besoknya sih ga datang lagi” (Responden 38, 38 Tahun)

Selain dampak positif, beberapa responden menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap pembentukan Satgas Covid-19 ini berdampak negatif bagi masyarakat di Desa Pemogan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan responden seperti berikut : “Saling argumenlah pada pemilik toko, padahal kita sudah tegasi untuk memutus rantai covid, dengan lembut kita beritahu, agar kita cepat hilang dari pandemi ini, agar kita bisa new normal lagi. itulah yang susah jika di pedagang - pedagang” (Responden 24, 41 tahun) “Dampaknya dari segi usaha, masyarakat kita kan tumbuh, selama pphk kita himbau untuk buka warung tutup jam 10 malam, jelas jelas perekonomian masyarakat ada dampaknya yang jelas masyarakat sangat mengerti sekali dengan situasi ini” (Responden 11, 50 Tahun)

Pembentukan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Pemogan juga dirasakan tidak memberikan dampak ke masyarakat. Hal ini dinyatakan dengan pemaparan responden sebagai berikut : “Dampaknya tidak terlalu signifikan, dampaknya bisa di bilang tidak ada, karena dampaknya itu oknum saja sebenarnya” (Responden 29, 43 Tahun)

Adanya beragam respon dari masyarakat tentang pembentukan Satgas Covid-19, salah satunya dipengaruhi oleh kredibilitas dari Satgas Covid-19 di desa pemogan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat. Menurut Effendi (2003), faktor penting penting pada komunikator pada saat melakukan kegiatan komunikasi adalah sumber daya tarik (*source attractiveness*) dan sumber kepercayaan (*source credibility*). Sumber kepercayaan (*source credibility*) dari tim Satgas Covid-19 yang memiliki keahlian dan profesi memadai akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengikuti himbauan atau edukasi yang diberikan. Hal ini akan memberikan dampak perubahan pada perilaku masyarakat untuk mematuhi PPKM Mikro di Desa Pemogan.

Selain itu, menurut (WHO, 2022) menyatakan bahwa tokoh masyarakat merupakan jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat sebagai penerima program kesehatan, agar masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat menerima program – program tersebut. Kegiatan ini disebut dengan bina suasana yang dapat menciptakan interaksi yang baik sehingga mendapatkan feedback yang positif dari masyarakat, begitu juga sebaliknya

## KESIMPULAN

Kinerja Satgas Covid-19 dipengaruhi oleh pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan regulasi tersebut. Efektivitas kinerja Satgas Covid-19 belum efektif hal ini dikarenakan masih adanya kendala - kendala yang dihadapi oleh Satgas Covid -19 di Desa Pemogan yaitu masih ada masyarakat yang tidak patuh dalam melaksanakan PPKM Mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Mendemonstrasikan ketelitian menggunakan analisis tematik: pendekatan hibrida pengkodean induktif dan deduktif dan pengembangan tema. *Jurnal Internasional Metode Kualitatif*, 5 (1), Maret 2006.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Arif. (2020). *Timur Melintasi Pandemi Covid-19*.
- Kemendes RI. (2020). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/Desa*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Kemendes, 2010)
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali
- Kemendagri RI. (2021). *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.
- Mohammed. (2020). Egyptian knowledge, perceptions and attitudes towards the novel corona virus disease (COVID-19). *Journal of Public Health*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2016, 12 12). *Trust in Government*. Retrieved from OECD: <http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm>
- Sastroasmoro, S. 2011. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta Sagung Seto.
- Anggriani, A., & Sulaiman, S. (2021). Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Di Era New Normal Dan Risiko Covid-19 Pada Mahasiswa Stikes Siti Hajar. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 3(2), 86-95.
- WHO. (2022). *COVID-19 Weekly Epidemiological Update Global overview*.